

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik (Soimah, 2014). Organisasi sektor publik yang sering dihubungkan dengan pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan. Pemerintah merupakan entitas publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan. Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan (Hariyanto, 2012). Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan.

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholder* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi, 2016:13). Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Diketahui bahwa ada banyak pihak yang mementingkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Laporan Keuangan yang disajikan Pemerintah Daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) relevan; (2) andal; (3) dapat dibandingkan; dan (4) dapat dipahami. (Mahmudi, 2016:11).

Berbicara mengenai pelaporan keuangan dan nilai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah akan menimbulkan pertanyaan apakah pelaporan keuangan pemerintah selama ini sudah memenuhi kriteria kompetensi informasi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Apakah laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (UU No 17 Tahun 2003) telah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintahan daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat Opini yang diberikan pemeriksa yaitu Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Adapun rekap opini hasil pemeriksaan LKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :

Table 1.1

**Daftar Opini Audit BPK atas LKPD
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2017**

Tahun	Opini BPK
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber :bpk tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kab Bandung Barat mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan menjadi WTP (wajar dalam pengecualian).

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus puas mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ini kelima kalinya Pemkab Bandung Barat mendapatkan opini WDP sejak di bawah kepemimpinan Abubakar-Ernawan pada 2012 yang dilanjutkan Abubakar-Yayat Soemitra sejak 2013. Penyebab gagalnya Pemkab meraih opini WTP pada LKPD tahun lalu masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi di kabupaten bandung barat yang masih jauh dari harapan. Selain itu faktor lain yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapat opini WDP tersebut terdapat pada pengelolaan dana bantuan oprasional serta piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. (Wijaya 2017).

Terkait dengan faktor penyebab Pemkab Bandung Barat mendapatkan opini WDP (wajar dengan pengecualian) dari BPK maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memerlukan adanya sistem informasi akuntansi yang baik pada entitas pelaporan. Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan atau group dari sub sistem / komponen / bagian apapun baik fisik / non fisik yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan bekerja sama secara harmonis untuk

mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan (Susanto, 2013). Informasi yang dihasilkan melalui sistem informasi akuntansi kemudian dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam suatu organisasi.

Sistem Informasi Akuntansi mengacu pada Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 yang direvisi oleh Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010, aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006 yang direvisi oleh Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2011, sistem ini berbasis pada jaringan komputer yang mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik. Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi memiliki tujuan yaitu sebagai pengendalian perilaku bawahan (peran pengendalian) dan memudahkan pengambilan keputusan (peran manajemen keputusan). Sistem Informasi Akuntansi dapat diterapkan secara manual maupun terkomputerisasi.

Kendala sistem informasi akuntansi di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diantaranya disebabkan oleh pencatatan tidak/ belum dilakukan secara akurat, proses penyusunan tidak sesuai ketentuan, entitas terlambat menyerahkan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan pelaporan belum didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. (BPK, 2017).

Perbedaan yang mendasar antara permasalahan yang terjadi di Kabupaten

Bandung Barat mengenai Kualitas Laporan Keuangan dan Sistem Informasi Akuntansi yaitu, output yang dinilai untuk kualitas laporan keuangan yaitu berupa opini BPK sedangkan output yang dinilai dari sistem informasi akuntansi yaitu adanya suatu kebijakan yang diterapkan dengan terstruktur dan sistematis yang ditunjang dengan teknologi yang memadai sehingga entitas dapat menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan kebijakan tersebut. Dalam proses pencapaian output tersebut bisa saja ada suatu kesamaan langkah-langkah dalam upaya pencapaian output yang sebaik mungkin.

Selain sistem informasi akuntansi, adajuga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu, sistem pengendalian internal. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh kepala daerah, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui: efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku (COSO, 2013:95). Dalam akuntansi, pengendalian internal yang berlaku dalam organisasi/instansi merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat atas kewajaran laporan yang diauditnya, auditor meletakkan kepercayaan atas efektifitas sistem pengendalian intern dalam mencegah terjadinya kesalahan yang material.

Permasalahan utama di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yaitu terdapat pada Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan pendapatan antara lain mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan,

SOP belum disusun, dan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan. Hal yang sama juga terdapat pada sistem pengendalian internal dalam pengelolaan belanja yang antara lain prosedur oprasi standar (SOP) belum disusun, pencataan belum dilakukan atau tidak akurat. Permasalahan lain kelemahan sistem pengendalian internal terjadi karena pejabat/pegawai yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku tentang sistem pengendalian internal pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, kurang koordinasi antar pejabat terkait, belum membuat kebijakan/prosedur untuk suatu kegiatan oprasional, serta belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya. (BPK, 2017).

Sistem pengendalian internal di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih lemah hal ini dibuktikan dengan mekanisme pengelolaan penerimaan negara yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kurangnya tanggung jawab pejabat/pegawai yang menaati, dan memahami ketentuan yang berlaku.

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang diteliti oleh Siti Chodijah, Dan Nurul Hidayah (2014), Raja Yoga Gustika Armel (2017), Tissa Nurul Husna (2017), Harnoni (2016), dan As Syifa Nurillah (2014),

2. Sistem Informasi Akuntansi yang diteliti oleh Irzal Tawakal, Suparno (2017), Franta Eveline (2016), Ismail dan Neo Agustina (2016), Berry Wan Saputra (2015), Silviana (2014), Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari, I Made Pradana Adiputra, Edy Sujana (2014), Rukmi Juwita (2013),
3. Pengendalian Internal yang diteliti oleh Siti Chodijah, Dan Nurul Hidayah (2018), Irzal Tawakal, Suparno (2017), Raja Yoga Gustika Armel (2017), Desmaria Puji Kesuma, ChoirulAnwar, Darmansyah (2017), Tissa Nurul Husna (2017), Franta Eveline (2016), Harnoni (2016), Sri Rokhlinasari dan Adi Hidayat (2016), Ramdany (2015), Berry Wan Saputra (2015), T. Asri Yunita (2015), Ni Ketut Rusmiadi Putri, Nyoman Ari Surya Darmawan, Desak Nyoman Sri Werastuti (2015), As Syifa Nurillah (2014), Desy Sefri Yensi, H. Amir Hasan dan Yuneita Anisma (2014), dan Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014)
4. Kompetensi SDM yang diteliti oleh Irzal Tawakal, Suparno (2017), Raja Yoga Gustika Armel (2017), Tissa Nurul Husna (2017), Franta Eveline (2016), Harnoni (2016), Ni Ketut Rusmiadi Putri, Nyoman Ari Surya Darmawan, Desak Nyoman Sri Werastuti (2015), As Syifa Nurillah (2014), dan Desy Sefri Yensi, H. Amir Hasan dan Yuneita Anisma (2014)
5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diteliti oleh Raja Yoga Gustika Armel (2017), Desmaria Puji Kesuma, ChoirulAnwar,

Darmansyah (2017), Berry Wan Saputra (2015), T. Asri Yunita (2015), Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014), Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari, I Made Pradana Adiputra, Edy Sujana (2014), dan Rukmi Juwita (2013)

6. *Good Governance* yang diteliti oleh Desmaria Puji Kesuma, ChoirulAnwar, Darmansyah (2017)
7. Kompetensi Aparatur Pemerintah yang diteliti oleh Desmaria Puji Kesuma, ChoirulAnwar, Darmansyah (2017)
8. Sisten Akuntansi Keungan Daerah yang diteliti oleh Tissa Nurul Husna (2017), As Syifa Nurillah (2014), dan Desy Sefri Yensi, H. Amir Hasan dan Yuneita Anisma (2014)
9. Peran Inspektorat yang diteliti oleh Tissa Nurul Husna (2017)
10. Komitmen Organisasi yang diteliti oleh Franta Eveline (2016)
11. Kompetensi Staf Akuntansi yang diteliti oleh T. Asri Yunita (2015), Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014)

Berdasarkan uraian diatas supaya memudahkan dalam menganalisis maka penulis menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

15	2014	As Syifa Nurillah	v		v	v				v			
16	2014	Desy Sefri Yensi, H. Amir Hasan dan Yuneita Anisma	-	-	x	v	V	-	-	-	-	-	-
17	2014	Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan	-	-	v	-	V	-	-	-	-	-	v
18	2014	Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari, I Made Pradana Adiputra, Edy Sujana	-	v	-	-	V	-	-	-	-	-	-
19	2014	Meilani Purwanti, Wasman	-	v	v	-	-	-	-	-	-	-	-
20	2013	Rukmi Juwita	-	v	-	-	V	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

v = Mempengaruhi

- = Tidak diteliti

x = Tidak Berpengaruh

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Irzal tawaqal, suparno (2017) dengan judul “pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan”. Penelitian ini menggunakan populasi pejabat penatus keuangan (PPK) yang berlokasi di SKPD pemerintah Kota Banda Aceh. Dengan total responden 78 responden dari 39 SKPD.

Variabel independen dalam penelitian sebelumnya yaitu pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia. Variabel dependen yaitu kualitas laporan

keuangan. Unit analisis dalam penelitian tersebut yaitu pejabat penatus keuangan (PPK) yang berlokasi di SKPD kota Banda Aceh. Unit observasi menggunakan data primer dikumpulkan oleh instrumen penelitian kuisioner. Teknik sampling yang digunakan yaitu metode sensus dimana keseluruhan populasi dimasukan kedalam penelitian.

Hasil dalam penelitian tersebut yaitu penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Variabel indeviden dari penelitian ini yaitu sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini penulis tidak menyertakan salahsatu variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia karena variabel kompetensi sumber daya manusia sudah menunjukan konsistensi dimana variabel sumber daya manusia yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya menunjukan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun alasan lain menurut penulis kompetensi sdm di pemerintahan kurang lebih sama rata dikarenakan kompetensi sdm dipemerintah atau PNS perekrutan kepegawaian sudah terpusat di badan kepegawaian negara (BKN), persyaratannya sudah jelas dan ujiannya pun terkomputerisasi yang dimana hasilnya akan diputuskan langsung oleh negara. Perbedaan lain antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada populasi penelitian, waktu, dan tempat penelitian dimana penelitian sebelumnya dilakukan di SKPD pemerintah Kota Banda Aceh dengan populasi pejabat penatus keuangan (PPK)

sedangkan peneliti melakukan penelitian di SKPD pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan populasi seluruh staf akuntansi.

Alasan penulis dalam pemilihan variabel ini adalah karena penelitian mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal telah banyak diteliti, namun hasil dari penelitian tersebut tidak memberikan konsistensi yang signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Irzal tawakal, suparno (2017), franta eveline (2016), Ismail dan Neo Agustina (2016), Silviana (2014), Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari, I Made Pradana Adipura, Edy Sujana (2014), Meliani Purwanti, Wasman (2014), dan Rukmi Juwita (2013) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Berry Wan Saputra (2015) disebutkan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Chodijah, Dan Nurul Hidayah (2018), Irzal Tawakal, Suparno (2017), Raja Yoga Gustika Armel (2017), Desmaria Puji Kesuma, ChoirulAnwar, Darmansyah (2017), Tissa Nurul Husna (2017), Harnoni (2016), Sri Rokhlinasari dan Adi Hidayat (2016), Berry Wan Saputra (2015), T. Asri Yunita (2015), Ni Ketut Rusmiadi Putri, Nyoman Ari Surya Darmawan, Desak Nyoman Sri Werastuti (2015), As Syifa Nurillah (2014), Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman

Ari Surya Darmawan (2014), menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Desy Sefri Yensi, H. Amir Hasan dan Yuneita Anisma (2014), menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Survei pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)”**.

1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis menarik beberapa identifikasi masalah, yaitu :

1. Adanya peran pengendalian internal di pemerintahan belum menjamin bahwa SKPD dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan
2. Kurangnya perhatian atas kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintahan daerah
3. Kurangnya implementasi sistem informasi secara menyeluruh guna menunjang seluruh kegiatan akuntansi yang ada di lingkup pemerintah
4. Kurangnya ada sinkronisasi antara sistem informasi akuntansi yang diterapkan dengan pengendalian internal yang dilakukan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
2. Bagaimana Pengendalian Internal Pemerintah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
3. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
4. Seberapa besar Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
5. Seberapa besar Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
6. Seberapa besar Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Sistem Informasi Akuntansi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
2. Untuk mengetahui Pengendalian Internal Pemerintah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
3. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
4. Untuk mengetahui apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
5. Untuk mengetahui apakah Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
6. Untuk mengetahui apakah Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan menjadi referensi atau rujukan tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai bidang kajian yang diteliti.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir, menambah kemampuan intelektual, memperdalam pengetahuan penulis berkenaan dengan penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan menambah ilmu khususnya pada mata kuliah akuntansi sektor publik.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi dan membantu pihak manajemen publik dalam mengambil kebijaksanaan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan daerahnya dimasa yang akan datang.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya serta menjadi sumber informasi atau masukan mengenai konsep pemahaman standar akuntansi pemerintahan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Padalarang - Cisarua KM 2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu penelitian dimulai.